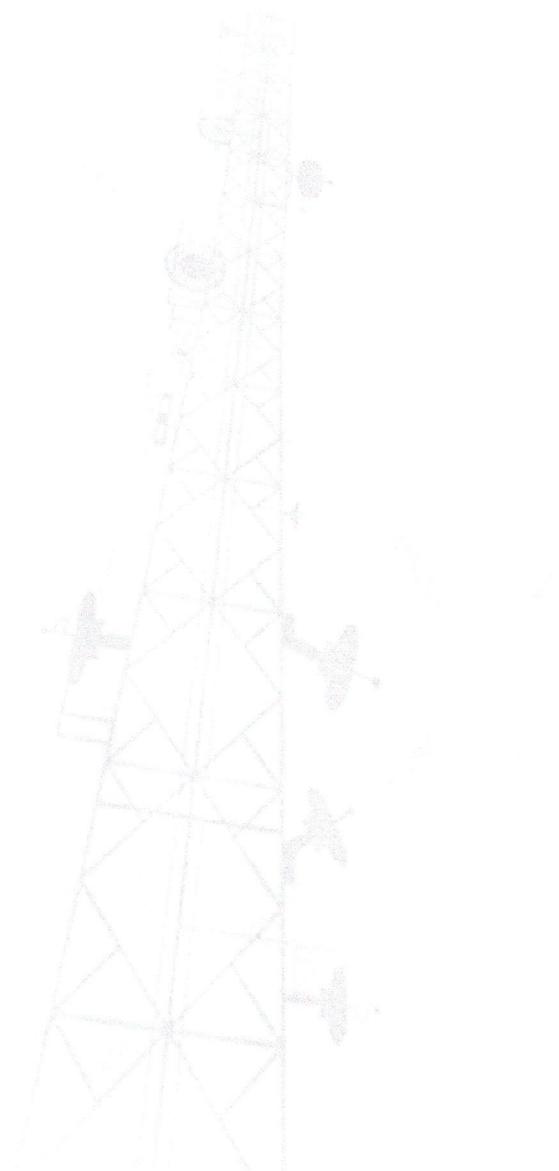


Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
**( LAKIP )**  
**TAHUN 2023**



Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate  
Telp : (0921) 3117734 - Fax : (0921) 3117734  
Email : pemkot@ternatekota.go.id Website : <http://kominfo.ternatekota.go.id>

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang mana setiap Instansi Pemerintahan dituntut mampu menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi keberhasilan dan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan Pemangku Kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, secara terukur berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan.

LAKIP disusun dengan memuat perspektif keberhasilan dan kegagalan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, sesuai tujuan, sasaran, dan strategi organisasi dalam upaya pencapaian target dan relaisasi visi dan misi organisasi.

Terima Kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Besar harapan kami, capaian ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.

Ternate, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Persandian Kota Ternate



**DAMIS BASIR, SE, ME**  
NIP : 19680724 200003 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar penyusunan laporan ini mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Adapun Sasaran Strategis OPD telah ditetapkan dengan 7 Indikator Kinerja, dengan berdasarkan hasil Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2023 yang diklasifikasikan antara lain : (1) Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, (2) Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik dan (3) Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian dapat dilihat dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Diskominfo Kota Ternate Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis TIK	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>				
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	2,6	1,20	46,20 %	<b>Kurang</b> (Kep.MenPA N-RB No.13 Tahun 2024)
		Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online.	75 %	66 %	88 %	<b>Baik</b>
		Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat	46,9 %	35 %	74,63 %	<b>Cukup</b>
		Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/Celluler	90 %	90 %	100 %	<b>Sangat Baik</b>
		Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi	63 %	60 %	95,24 %	<b>Sangat Baik</b>
		<b>Urusan Statistik</b>				
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60 %	26 %	43,33 %	<b>Sangat Kurang</b>

		<b>Urusan Persandian</b>				
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	312	440	141 %	<b>Sangat Baik</b>

Pada tabel di atas tersebut terdapat 7 Indikator Kinerja yang menjadi target oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2023, dalam hal ini dapat diuraikan atau dijelaskan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian Indikator Kinerja : **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, untuk indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target indeks untuk tahun 2023 sebesar 1,8-2,6. Akan tetapi hasil penilaian atau pemantauan dan evaluasi yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Ternate dengan **Indeks sebesar 1,20** atau dengan predikat **“Kurang”**. Hal ini menjadi masalah disebabkan antara lain karena :
  - (1) Baru diundangkannya regulasi/peraturan daerah di tahun 2023 yaitu Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Sehingga dalam penyelenggaraan SPBE belum dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku.
  - (2) Minimnya dukungan dari OPD guna melaksanakan penerapan SPBE di lingkup Pemerintah Kota Ternate,
  - (3) Serta minimnya sumber daya manusia/aparatur yang memadai dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 2) Capaian Indikator Kinerja : **Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online**, dengan target pada tahun 2023 sebesar 75% dengan realisasinya sebesar 66%, oleh karena itu tingkat pencapaian kerjanya adalah **88%** dengan predikat **“Baik”**.
- 3) Capaian Indikator Kinerja : **Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat**, dengan target pada tahun 2023 sebesar 46,9% dengan realisasi 35%, oleh karena itu tingkat pencapaian kerjanya adalah **74,63%** dengan predikat **“Cukup”**.

- 4) Capaian Indikator Kinerja : **Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/Celluler**, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%, dengan realisasinya sebesar 90%, oleh karena itu tingkat pencapaian kerjanya adalah **100%** dengan predikat “**Sangat Baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan internet sudah dapat diakses secara keseluruhan di 8 (delapan) wilayah Kecamatan Kota Ternate. Akan tetapi untuk Kecamatan di luar pulau Ternate seperti Kecamatan Batang Dua, Moti dan Hiri perlu pengembangan dan ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas jaringan internetnya dengan menyediakan infrastruktur yang lebih memadai.
- 5) Capaian Indikator Kinerja : **Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi**, yang ditetapkan pada tahun 2023 target sebesar 63%, dengan realisasinya sebesar 60% oleh karena itu tingkat pencapaian kerjanya adalah **95,24%** dengan predikat “**Sangat Baik**”. Capaian ini tergolong sudah memadai dalam hal ini mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu (1) Kecamatan Ternate Tengah, (2) Kecamatan Ternate Utara, (3) Kecamatan Ternate Selatan, (4) Kecamatan Ternate Barat, (5) Kecamatan Pulau Ternate dan (6) Kecamatan Pulau Hiri. Sedangkan untuk 2 (dua) Kecamatan di luar pulau Ternate seperti Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Moti masih belum efektif, disebabkan kualitas jaringan internetnya masih dikatakan belum baik kualitasnya, sehingga pelayanan informasi dan publikasi masih menjadi terkendala dalam melakukan akses internet.
- 6) Capaian Indikator Kinerja : **Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral**, untuk indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target untuk tahun 2023 sebesar 60%, dengan realisasinya sebesar 26%, oleh karena itu tingkat pencapaian kerjanya adalah **43,33%** dengan predikat “**Sangat Kurang**”. Hal ini disebabkan antara lain (1) Minimnya koordinasi dan sinkronisasi antara OPD terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam pengumpulan, pengelolaan data, serta dalam analisis data statistik sektoral, (2) minimnya sumber daya manusia/aparatur di bidang TIK untuk mengelola data statistik.
- 7) Capaian Indikator Kinerja : **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target untuk tahun 2023 Indeks sebesar 312 dengan realisasinya sebesar 440,

hal ini tingkat pencapaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan atau sebesar **141%** dengan Predikat “**Sangat Baik**”. Predikat ini disebabkan salahsatunya adalah (1) Kebijakan, prosedur, dan tindakan preventif, telah menjadi faktor kunci dalam mencapai Indeks Keamanan Informasi yang tinggi. (2) Penggunaan solusi terkini dan pembaruan terhadap infrastruktur keamanan informasi dapat memperkuat pertahanan sistem terhadap ancaman yang terus berkembang. Ini mencerminkan dedikasi dan komitmen organisasi dalam menjaga keamanan informasi, mengamankan aset digital, dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Secara umum tingkat pencapaian Indikator Kinerja yang diukur dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tingkat pencapaian kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2023, dapat dikatakan atau dikategorikan “**Baik atau Berhasil**”.

Untuk alokasi Anggaran APBD Tahun 2023 untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate telah mengalami perubahan dimana Anggaran Induk pada awal Januari 2023 dengan pagu anggaran sebesar : **Rp. 7.322.330.214,-** (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*). Sedangkan setelah **Perubahan Anggaran** menjadi sebesar : **Rp. 7.928.794.696,-** (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*). Hal ini terjadi karena ada **Penambahan Anggaran** sebesar **Rp. 606.464.482,-** (*Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Sedangkan Realisasi anggaran APBD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar : **Rp. 7.669.990.160,-** (*Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) atau mencapai sebesar **96,74%**.

Ternate, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Persandian Kota Ternate



**DAMIS BASIR, SE, ME**  
NIP : 19680724 200003 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR OPD .....	4
1.5 ISU-ISU STRATEGIS .....	19
1.6 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI.....	28
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	31
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA 2021-2026) .....	31
2.2 TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026.	35
2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD.....	37
2.4 PERJANJIAN KINERJA .....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	40
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	41
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023.....	41
B. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	44

3.2	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN .....	47
	A Alokasi Anggaran.....	47
	B Realisasi Anggaran.....	48
	BAB IV PENUTUP .....	52
4.1	SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	52
4.2	LANGKAH ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA AKAN DATANG .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Diskominfo Kota Ternate Tahun 2023 .....	ii
Tabel 2 : Data Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan.....	17
Tabel 3 : Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	17
Tabel 4 : Keterkaitan Antara Isu Strategis,Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah .....	26
Tabel 5 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Perwujudan Misi Walikota Ternate Tahun 2021-2026 .....	35
Tabel 6 : Target Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sesuai Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate 2021-2026 .....	36
Tabel 7 : Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD.....	37
Tabel 8 : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023.....	38
Tabel 9 : Pagu Anggaran Induk Tahun 2023 Per-Program .....	39
Tabel 10 : Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 Per-Program.....	39
Tabel 11 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	40
Tabel 12 : Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	41
Tabel 13 : Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023 .....	45
Tabel 14 : Perubahan Pagu Anggaran Diskomsandi Ternate Tahun 2023.....	47
Tabel 15 : Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan Realisai Tahun 2022 .....	48
Tabel 16 : Realisasi Anggaran Per-Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Diskomsandi Tahun 2023 .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota  
Ternate ..... 16

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate dan Peraturan Walikota Ternate Nomor. 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, yaitu tugasnya melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian. Kebijakan umum pemerintah dalam rangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkam *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang mana setiap Instansi Pemerintahan dituntut mampu menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi keberhasilan dan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan Pemangku Kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, secara terukur berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, dalam bentuk capaian program/kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2023.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ternate Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154);

9. Peraturan Walikota Ternate Nomor. 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 281);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate 152);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 215);
12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 507);
13. Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 42 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 501);
14. Peraturan Walikota Ternate Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 555);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Diskomsandi Kota Ternate dalam pencapaian visi dan misi Walikota Ternate di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuannya adalah :

- (a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Diskomsandi Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2023.
- (b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Diskomsandi Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan

dalam rangka memperbaiki kinerja Diskomsandi Kota Ternate di masa yang akan datang.

#### **1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR OPD**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, serta Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate menjalankan tugas pokok, yaitu :

##### **1.4.1 Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

##### **1.4.2 Fungsi**

- (1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi.
- (2) Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang meliputi ; Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, dan Bidang Persandian.
- (3) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

##### **1.4.3 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural**

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian antara lain :

###### **(1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang komunikasi, informatika dan persandian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan Persandian;

- b) Pelaksanaan kebijakan Daerah dan kebijaksanaan umum di bidang pelayanan komunikasi, informatika dan pemberdayaan informasi masyarakat serta persandian;
- c) Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi, komunikasi dan persandian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi terkait serta organisasi lain di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
- e) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian sub bidang dan cabang komunikasi informatika;
- f) Pelaksanaan monitoring dan pelayanan komunikasi, informasi, serta pendapat umum Daerah;
- g) Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## (2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat yang berbasis kinerja;
- b) Pelaksanaan koordinasi rencana program kerja dan kegiatan Dinas;
- c) Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas;
- e) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan dan anggaran Dinas;

- f) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
- g) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Dinas;
- h) Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja Dinas;
- i) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k) Pelaksanaan analisis dan menyajikan data Dinas;
- l) Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
- m) Pelaksanaan penetapan dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- n) Pelaksanaan urusan pemantauan, pengendalian, evaluasi kinerja, serta program dan kegiatan Dinas;
- o) Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- p) Pelaksanaan penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- q) Pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat;
- r) Pelaksanaan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Sekretariat;
- s) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kegiatan Dinas; dan
- t) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris membawahi antara lain :

**1) Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- d) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan program jangka panjang, menengah dan pendek, serta penyusunan pelaporan Dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan (RKA dan DPA);
- e) Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- f) Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- g) Pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran serta penyusunan laporan anggaran;

- h) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### (3) Bidang Informatika

Bidang Informatika mempunyai tugas pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan pengembangan kemitraan media. Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Informatika yang berbasis kinerja; pelaksanaan rencana perumusan kebijakan teknis di Bidang Informatika;
- b) Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja di Bidang Informatika;
- c) Pelaksanaan pembinaan di Bidang Informatika;
- d) Pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi informatika;
- e) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan sistem informasi;
- f) Pelaksanaan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Informatika;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Informatika membawahi :

#### 1) Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika

Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika mempunyai tugas merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pembangunan, serta pengembangan jaringan komunikasi teknologi Pemerintah Daerah.

Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis operasional pengembangan teknologi informatika;
- c) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang infrastruktur dan perangkat informatika;
- d) Pelaksanaan sarana dan prasarana di bidang informatika;
- e) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi dalam rangka pembangunan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah;
- f) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi melalui jaringan koneksitas website;
- g) Pelaksanaan pemberian rekomendasi pembangunan Menara telekomunikasi;
- h) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2) Seksi Aplikasi *E-Governance* Perangkat Informatika**

Seksi Aplikasi *E-Governance* Perangkat Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dibidang aplikasi *E-Governance* perangkat informatika. Seksi Aplikasi *E-Governance* Perangkat Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi aplikasi *E-Governance* Perangkat Informatika;
- b) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi di bidang aplikasi *E-Governance* Perangkat Informatika;
- c) Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai aplikasi *E-Government* Perangkat Informatika;

- d) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**(4) Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran**

Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran mempunyai tugas di bidang publik telekomunikasi dan penyiaran. Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- c) Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- d) Pelaksanaan pembinaan di bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi publik dan dokumentasi;
- f) Pelaksanaan desiminasi informasi;
- g) Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun nasional;
- h) Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi Pemerintah Daerah maupun pusat;
- i) Pelaksanaan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- k) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pos, penyiaran dan telekomunikasi;

- l) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kantor agen jasa titipan, kantor cabang dan loket pelayanan telekomunikasi;
- m) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung seluler, telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan instalatur kabel rumah/gedung;
- n) Pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat, penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal, serta penetapan wilayah prioritas kewajiban pelayanan universal telekomunikasi;
- o) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekwensi di daerah perbatasan;
- p) Pelaksanaan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran;
- q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran; dan
- r) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran membawahi :

#### **1) Seksi Desiminasi Informasi**

Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang desiminasi informasi. Seksi Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Desiminasi Informasi;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang desiminasi informasi;
- c) Pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai aplikasi telematika;
- d) Pelaksanaan penyelenggaraan sarana desiminasi;

- e) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi;
- f) Pelaksanaan pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang desiminasi informasi;
- i) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2) Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran**

Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap pers dan media massa. Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran;
- b) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang perizinan telekomunikasi dan penyiaran;
- c) Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dalam pemetaan dan pembinaan menyangkut dengan penyiaran, pemberitaan dan rekaman;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media massa dan elektronik;
- e) Pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi bagi kalangan insan pers dan masyarakat;
- f) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan perizinan di bidang penyiaran, pemberitaan dan rekaman;
- g) Pelaksanaan pemantauan peredaran film dan rekaman video komersil;

- h) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**(5) Bidang Persandian dan Pengolahan Data**

Bidang Persandian dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang persandian dan pengolahan data. Bidang Persandian dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Persandian dan Pengolahan Data;
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan pengolahan data;
- c) Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja Bidang Persandian dan Pengolahan Data;
- d) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknis di bidang persandian dan pengolahan data;
- e) Pelaksanaan pengembangan sistem data base dan pelaporan data base Pemerintah Kota Ternate;
- f) elaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian dan pengolahan data;
- g) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sistem persandian dan pengolahan data;
- h) Pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di Bidang Persandian dan Pengolahan Data;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, kegiatan di Bidang Persandian dan Pengolahan Data; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian dan Pengolahan Data, membawahi :

**1) Seksi Perangkat dan Admisitrasi Persandian**

Seksi Perangkat dan Administrasi Persandian mempunyai tugas melaksanakan operasional pengelolaan dan sarana prasarana di

lingkungan Pemerintah Daerah. Seksi Perangkat dan Administrasi Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate;
- b) Pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan keamanan informasi berupa policy paper, naskah akademik, telahan atau memo;
- c) Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras sandi dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate;
- d) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- e) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- f) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2) Seksi Pengolahan Data Informatika**

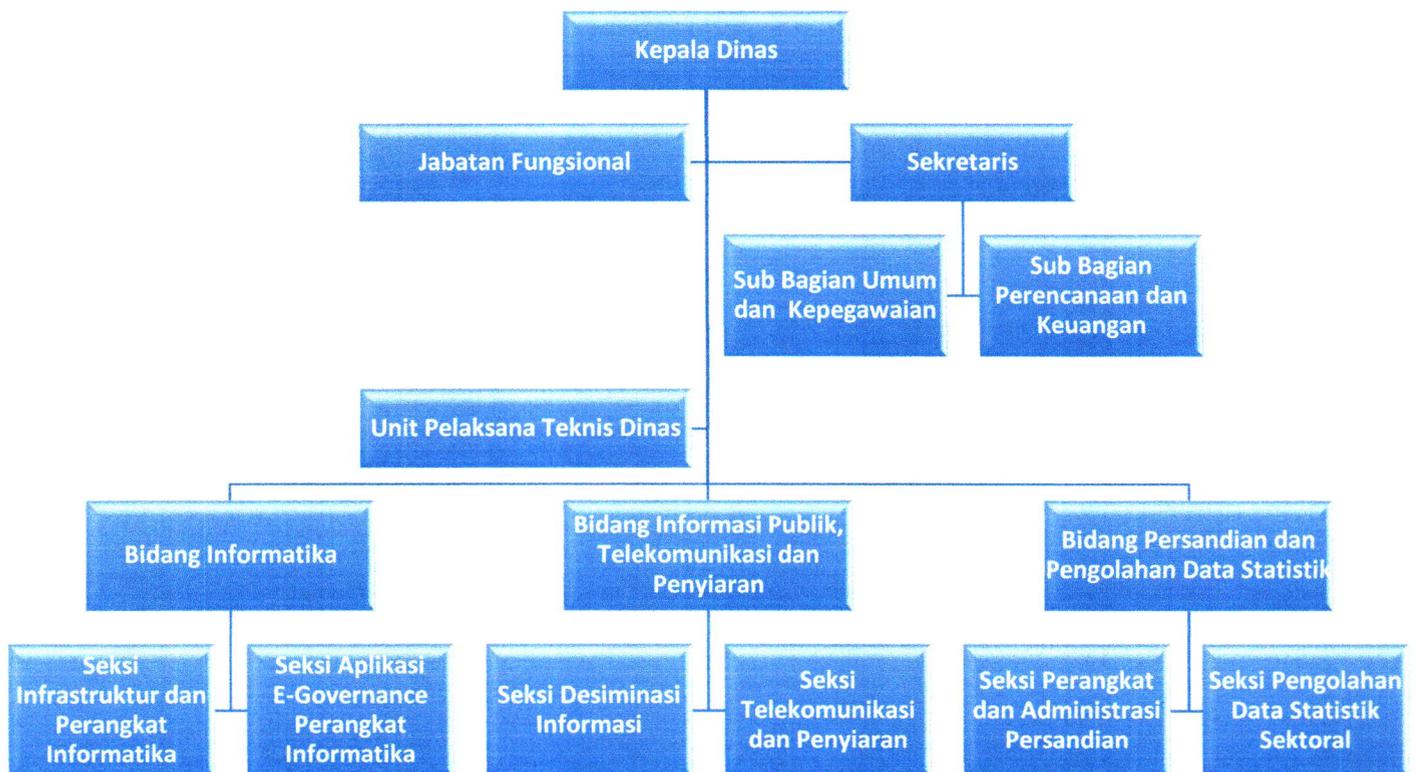
Seksi Pengolahan Data Informatika mempunyai tugas penyusunan data dan informasi pelaksanaan program Dinas. Seksi Pengolahan Data Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data Informatika;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam rangka penyusunan data informatika;
- c) Pelaksanaan pengumpulan, menghimpun data dan informasi Dinas;
- d) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang pengolahan data informatika;

- e) Pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- f) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi;
- g) Pelaksanaan pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi;
- h) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KOTA TERNATE**

Sumber : Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Ternate



*Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate*

#### 1.4.4 Sumber Daya OPD

##### (1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dimiliki mencakup Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada tahun 2023 memiliki pegawai sebanyak **35 orang**. Dari jumlah pegawai tersebut, berdasarkan Eselon Jabatan terdiri dari ; **Eselon II** (Kepala Dinas) 1 orang, **Eselon III** (Sekretaris/Kepala Bidang) sebanyak 4 orang, **Eselon IV** (Kepala Seksi/Kasubag ) sebanyak 7 orang, dan **Staf PNS** (Pelaksana/Staf) sebanyak 9 orang, serta **Staf Non PNS** (Pegawai Non PNS) sebanyak 14 orang.

Tabel 2 : Data Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon	Eselon	Eselon	Eselon	Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kepala Seksi / Kasubag				7		7
5	Pelaksana/Staf					9	9
6	Pegawai Non PNS					14	14
<b>Total</b>							<b>35</b>

Tabel 3 : Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	1	2	-	-	-	-	3

4	Kepala Seksi / Kasubag	-	-	6	1	-	-	-	7
5	Pelaksana/Staf	-	1	2	1	5	-	-	9
6	Pegawai Non PNS	-	-	5	2	7	-	-	14
<b>Total</b>		-	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	-	-	<b>35</b>
<b>Persentase</b>			<b>9%</b>	<b>46%</b>	<b>11%</b>	<b>34%</b>	-	-	<b>100%</b>

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada tahun 2023 sebanyak **35 Orang**, yang terdiri dari : **3 orang** memiliki **Pendidikan S2 (9%)** yaitu ; Kepala Dinas 1 orang, Kepala Bidang 1 orang dan Pelaksana/Staf 1 orang. Sedangkan **16 Orang** memiliki **Pendidikan S1 (46%)** yaitu ; Sekretaris 1 Orang, Kepala Bidang 2 orang, Kepala Seksi/Kasubag 6 orang, Pelaksana/Staf 2 Orang dan Pegawai Non PNS 5 orang. Adapun **2 orang** memiliki **Pendidikan D3 (11%)** yaitu ; Kepala Seksi/Kasubag 1 orang dan Pelaksana/Staf 1 orang dan Pegawai Non PNS 2 orang . Sedangkan **12 orang** memiliki **Pendidikan SLTA (34%)** yaitu: Pelaksana/Staf 6 Orang dan Pegawai Non PNS 7 orang.

## (2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

### ➤ Gedung :

Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate menempati 2 Ruang di Gedung Eks. Kantor Walikota Ternate Jl. Yos Sudarso dengan Luasan Ruangan 1 seluas ± 20 M<sup>2</sup> (Ruang Studio) dan Ruang II seluas ± 180 M<sup>2</sup>.

### ➤ Sarana Pendukung :

Sejak Pembentukan dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, telah mengadakan beberapa Sarana Penunjang yang terdiri dari Mebeler Kantor, Peralatan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Studio, Peralatan Jaringan dan sejumlah Peralatan lainnya.

## 1.5 ISU-ISU STRATEGIS

### 1.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Secara Garis Besar Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah saat ini terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana telah teridentifikasi dalam RPJMD Kota Ternate 2021-2026 adalah :

#### (1) Masalah Utama Perangkat Daerah :

- Belum Optimalnya Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Masih Rendahnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur jaringan komunikasi.
- Belum Optimalnya Penyediaan Data Statistik Sektoral dan Satu Data..
- Belum Optimalnya Management Pengelolaan Persandian.

#### (2) Masalah Daerah terkait Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika :

- Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Belum Optimalnya Pelaksanaan Smart City.
- Masih Rendahnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur Jaringan komunikasi.

#### (3) Masalah Daerah terkait Bidang Urusan Statistik :

- Belum Optimalnya penyajian Data Sektoral sesuai kebutuhan informasi Pembangunan Daerah.
- Belum terciptanya sistem Satu Data sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
- Belum Tepatnya waktu penerbitan publikasi data dan informasi Statistik Daerah.

#### (4) Masalah Daerah terkait Bidang Urusan Persandian :

- Belum Optimalnya Pengelolaan Persandian dan pemanfatannya.

Dalam Upaya penyelesaian Masalah Daerah dan Perangkat Daerah di atas, oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dibentuk sejak tahun 2016 s/d 2023, ditemui beberapa Kondisi, kendala dan masaalah yang memerlukan perhatian lebih dan Tindak lanjut yang konkrit untuk memperbaikinya. Kondisi atau gambaran umum dari Hambatan atau kendala khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Struktur Geografis wilayah Pemerintah Kota Ternate yang terdiri dari Pulau Ternate dan 3 Pulau kecil lainnya yang terpisah dalam jarak cukup berjauhan. Hal ini menyulitkan dalam jangkauan akses pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi.
- (2) Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari Sisi Kualitas maupun Kuantitas Aparatur yang memiliki Kapabiliitas dan Keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (3) Infrastruktur dan Sarana Komunikasi, Informatika dan Persandian yang tersedia masih sangat minim terkait dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara efektif dan aman.
- (4) Konektifitas antar OPD dalam rangka koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Program Pemerintah dan perwujudan E-Government belum bisa terlaksana secara baik.
- (5) Belum efektifnya pelayanan terhadap masyarakat, yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama dalam layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat.
- (6) Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
- (7) Regulasi Daerah yang belum memadai di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sehingga mampu melibatkan seluruh Perangkat Daerah untuk bersinergi dalam Penerapan SPBE dan Pelayanan Masyarakat berbasis TIK.
- (8) Di bidang Pengelolaan Data Statistik Sektoral masih terdapat hambatan mengenai penyediaan data dari perangkat Daerah terkait. Hal ini menghambat pewujudan Program Satu Data Kota Ternate, di mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berfungsi sebagai Walidata.

- (9) Penerapan sewa bandwidth internet yang belum dilakukan satu pintu sehingga ada potensi ketidakefisienan dalam penganggaran. Hal ini karena setiap Perangkat daerah dan Unit Kerja berlangganan secara sendiri-sendiri layanan internet, sehingga penggunaan bandwidth internet sangat tidak terkontrol.
- (10) Yang terakhir adalah belum adanya keberpihakan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara optimal.

Permasalahan dan hambatan tersebut di atas harus dicarikan solusinya dan segera diperbaiki, agar fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate bisa berjalan secara maksimal.

### **1.5.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, yang tertuang dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan”**

**- Ternate Andalan –**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, akan merumuskan 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ke-delapan rumusan Misi Pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate di tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- (1) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
- (2) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Ekstraktif dan Responsif.
- (3) Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
- (4) Menumbuh - kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan 7 nilai dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi).
- (5) Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama dalam Berekonomi.
- (6) Setiap Warga Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dalam memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
- (7) Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
- (8) Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Ternate tersebut akan ditempuh melalui 14 (empat belas) Program Prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026, yaitu :

- (1) Pengembangan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan daya saing industry kreatif, UMKM dan IKM.
- (2) Pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
- (3) Mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
- (4) Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.
- (5) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (6) Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional.
- (7) Perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (8) Membangun dan menghidupkan entitas keragaman social budaya masyarakat.
- (9) Revitalisasi dan penataan pola ruang kota yang berkelanjutan.

- (10) Industrialisasi pengelolaan sampah secara partisipatif.
- (11) Konservasi sumber daya air.
- (12) Literasi dan Mitigasi kebencanaan.
- (13) Pengembangan kota sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa.
- (14) Revitalisasi dan penguatan peran BUMD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, maka misi yang memiliki arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang merupakan urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate adalah :

- **Misi ke 1 (satu)** yaitu : *“Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”*.
- **Misi ke 2 (dua)** yaitu : *“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif”*.

### **1.5.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kota Ternate tidak berkorelasi dengan kondisi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Kajian lingkungan hanya berkaitan topografi daerah dan jarak. Kajian mengenai topografi wilayah dan jarak sangat dibutuhkan dalam perencanaan dalam rangka konektivitas jaringan komunikasi, baik Jaringan berbasis Digital maupun analog. Topografi Wilayah Pulau Ternate dan serta ke 3 pulau lainnya Moti, Hiri dan Batang Dua adalah wilayah yang memiliki perbukitan. Posisi pulau Moti dan Pulau Ternate masih diantarai oleh 2 Pulau lainnya yaitu Maitara dan Mare. Sedangkan Posisi pulau-pulau Batang Dua terletak pada Jarak yang Jauh dari Pulau Ternate. Kondisi ini yang memerlukan

perencanaan teknis yang baik dalam upaya melakukan konektivitas jaringan komunikasi, terutama Jaringan Internet.

Rencana implementasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate selama 5 (lima) tahun (Tahun 2021-2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kota Ternate. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kota Ternate.

#### **1.5.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Di atas sudah diuraikan berbagai permasalahan Daerah dan Permasalahan OPD yang dihadapi serta telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Povinsi, Dari uraian tersebut dapat diambil telaahan dari sisi Internal dan Eksternal dari Kondisi saat ini yaitu :

##### **(1) Kekuatan/Strenght (S)**

- Adanya pergantian Kepala Daerah ke yang lebih Visioner dan Inovatif menjamin adanya komitmen perbaikan kebijakan serta mampu mendorong adaptasi terhadap kebarharuan dalam peyelenggaraan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Visi Misi Walikota yang menitikberatkan pada Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Adanya Komitmen membangun konektivitas wilayah antar pulau di wilayah Pemerintah Kota Ternate
- Adanya Stakeholder yang bisa diajak untuk bersenergi dalam Pembangunan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan sudah diaplikasikan, meskipun masih sangat terbatas.

**(2) Kelemahan/Weakness (W)**

- Pemanfaatan Sumber daya aparatur yang belum maksimal dalam pelayanan yang disebabkan minimnya sarana penunjang pelaksanaan tugas.
- Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien.
- Rendahnya Kerjasama antar Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yang memerlukan partisipasi Perangkat Daerah lain.
- Ketersediaan Ruang Kerja yang belum representatif.

**(3) Peluang/Opportunities (O)**

- Sebagai Kota Pulau, Ternate memiliki daya Tarik tersendiri terutama dari destinasi wisata sehingga akan merangsang terbentuknya inovasi baru dalam pelayanan berbasis Digital
- Ternate sebagai pusat pendidikan di Maluku Utara menjadi daya tarik bagi para pendatang dan kaum terpelajar.
- Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.
- Otonomi daerah yang luas membuka peluang daerah untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan publik

**(4) Ancaman/Treats (T)**

- Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga membutuhkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
- Banyaknya Potensi penyalahgunaan media berbasis teknologi informasi.
- Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga kebutuhan Jaringan dan areal jangkauan akses informasi yang semakin luas.
- Adanya Potensi Bencana Alam dan Bencana non alam seperti wabah Covid-19 akan bisa menjadi kendala dalam pembangunan.

Isu Strategisi Pemerintah Daerah yang berkorelasi langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate adalah isu **“Masih Kentalnya Budaya Primordialisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**. Isu Strategis dibuat berdasarkan Masalah yang telah teridentifikasi sebagai Masalah daerah dan Masalah Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Isu Strategis, Masalah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4 : Keterkaitan Antara Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

ISU STRATEGI DAERAH	MASALAH DAERAH	MASALAH UTAMA PERANGKAT DAERAH
<b>Masih Kentalnya Budaya Primordialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Berbasis Elektronik belum Optimal (Smart Governance)	Belum Optimalnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Masih rendahnya Penerpan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
		Belum Optimalnya Penyediaan Data Statistik Sektoral dan pelaksanaan Satu Data
		Belum Optimalnya Manajemen Penelolan Persandian

Berdasarkan uraian masalah dan analisa di atas, maka ditetapkan isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam periode 2021-2026 sebagai berikut :

**1. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya untuk menunjang kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Perlu adanya Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika.

**2. Urusan Statistik :**

- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Data dan Informasi sebagaimana dibutuhkan untuk Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan daerah.

### 3. Urusan Persandian :

- Belum Semua Unit Kerja memiliki Standard Pelayanan/SOP.
- Belum Maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang Persandian dan keamanan Informasi.

Isu strategis tersebut adalah acuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk menetapkan program dan kegiatan dalam setiap Tahun Anggaran. Untuk mewujudkan Program dan Kegiatan, terdapat beberapa faktor pendorong yang diharapkan menjadi peluang pelaksanaan dan pengembangan Program dan Kegiatan. Beberapa Peluang dan faktor Pendorong yang bisa diuraikan sebagai berikut :

- (1) Adanya dukungan kebijakan pimpinan dan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Kerjasama yang baik dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Ternate dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat.
- (3) Adanya dukungan sarana Informasi (surat kabar, radio, TV dan Internet) sebagai media Komunikasi dan publikasi.
- (4) Tersedianya berbagai Lembaga dan program pengembangan SDM di bidang Informasi dan Komunikasi yang dapat diakses oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur
- (5) Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.
- (6) Semakin luas jangkauan layanan provider Internet di Kota Ternate sehingga bisa membantu dalam memfasilitasi penyediaan Jaringan Internet ke seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate.

Disamping Faktor Pendukung dan faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat dan Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yaitu ;

- (1) Keterbatasan pilihan provider internet yang memungkinkan untuk menyediakan layanan internet ataupun seluler yang bisa menjangkau wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.

- (2) Masih rendahnya Kerjasama antar OPD dalam upaya peningintegrasian Jaringan, Data dan Informasi.
- (3) Kurangnya SDM yang handal di bidang TIK dan pengelolaan informasi.

## **1.6 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI**

Untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju kota Ternate sebagai kota jasa yang diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta seluruh Stakeholder. Untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

- (1) Kemitraan yang kuat dari seluruh aparaturnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
- (2) Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Ternate dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- (3) Adanya dukungan sarana komunikasi Informasi (surat kabar, radio, TV dan Internet) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
- (4) Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.
- (5) Tersedianya Provider penyedia Jasa Internet yang memadai dalam pemenuhan Kebutuhan Komunikasi Internet.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Tahun 2023, yaitu :

- (1) Luasnya Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari beberapa pulau sehingga memerlukan Pembiayaan yang cukup besar untuk bisa menghadirkan

kelancaran arus komunikasi informasi program kegiatan Pemerintah Kota Ternate yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate.

- (2) Ketersediaan Provider yang memiliki jaringan layanan internet di wilayah Pemerintahan Kota Ternate masih sangat terbatas.
- (3) Infrastruktur pendukung yang masih terbatas di wilayah terluar Kota Ternate yang meliputi Kecamatan Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua.
- (4) Terjadinya pemangkasan sejumlah Anggaran Program dan Kegiatan akibat kebijakan Re-focusing Anggaran serta keterbatasan akses secara fisik.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- (1) Memberikan pelayanan Penyediaan informasi yang maksimal melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Majalah/Tabloid, Radio FM/AM, internet, media center, pelayanan pengaduan publik, dll).
- (2) Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai Media pemberitaan.
- (3) Meningkatkan efisiensi Belanja Internet Pemerintah Daerah.
- (4) Memudahkan akses internet bagi masyarakat melalui penyediaan Wifi Gratis.
- (5) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik.
- (6) Menunjang pengembangan ekonomi dan kreatifitas masyarakat melalui berbagai layanan berbasis internet dan aplikasi elektronik.
- (7) Menciptakan koordinasi dan sistem kerja yang baik antar OPD melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (8) Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah.
- (9) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kota Ternate melalui Kelompok Informasi Masyarakat.

## 1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Adapun penyajian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai berikut :

### ➤ **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas, fungsi dan struktur OPD, isu-isu strategis, faktor pendorong keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta sistematika penyajian.

### ➤ **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini menguraikan mengenai Perencanaan Startegis, Indikator kinerja tahun 2021-2026, kebijakan OPD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### ➤ **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran tahun 2023 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

### ➤ **BAB IV PENUTUP**

Bab ini diuraikan simpulan capaian kinerja organisasi tahun 2023 dan Langkah organisasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA 2021-2026)

#### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

##### ➤ Visi

Dalam perjalanan menuju ke masa depan yang diinginkan dari tujuan suatu organisasi, harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan Visi Kota Ternate yaitu :

**“Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan”**

**# Ternate Andalan #**

➤ **Misi**

Delapan rumusan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Ternate di tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- (1) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
- (2) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Ekstraktif dan Responsif.
- (3) Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
- (4) Menumbuh - kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan 7 nilai dasar Kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi).
- (5) Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama dalam Berekonomi.
- (6) Setiap Warga Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dalam memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
- (7) Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
- (8) Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.

**2.1.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate**

Adapun Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate mengacu pada Visi dan Misi Walikota Ternate terpilih periode 2021-2024. Demi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Ternate tersebut, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

➤ **Visi**

***"Meningkatkan Kemandirian dan Keadilan dalam era digital melalui Penguatan Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang Andal, Terintegrasi dan Aman di Kota Ternate"***

➤ **Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Ternate yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat kota Ternate, khususnya di wilayah yang masih terkendala akses internet dan infrastruktur TIK yang memadai.
2. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan terintegrasi guna meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Kota Ternate, sehingga dapat memperkuat ekonomi lokal yang mandiri dan berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas layanan komunikasi, informatika, dan persandian di kota Ternate, termasuk di dalamnya layanan internet, jaringan telekomunikasi, dan aplikasi digital yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah.
4. Meningkatkan keamanan informasi dan persandian di kota Ternate dengan mengembangkan sistem keamanan dan perlindungan data yang handal dan aman, serta menerapkan standar-standar keamanan informasi yang berlaku.
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika, dan persandian dengan menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar yang relevan dan berkelanjutan.

### **2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka

perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Visi Kota Ternate yang Mandiri Dan Berkeadilan, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

- **Misi 1** yaitu: **“Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”**. Adapun **Tujuan** dari Misi 1 ini adalah : **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas**. Berdasarkan tujuan tersebut dalam pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka **Sasaran** adalah **Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi**.
- **Misi 2** yaitu: **“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif”**, Adapun **Tujuan** dari Misi 2 ini adalah **Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka **Sasaran** adalah **Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan upaya perwujudan misi Walikota Ternate Tahun 2021-2026 ini, dapat di lihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 5 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Perwujudan Misi Walikota Ternate Tahun 2021-2026

TARGET	TUJUAN	SASARAN
<b>Misi 1 : “Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”</b>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.	Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi.
<b>Misi 2 : “Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif”</b>	Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sumber : Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026

## 2.2 TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026

Keberhasilan pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diukur berdasarkan Indikator yang menjadi ukuran dari setiap sasaran masing-masing program dan kegiatan.

Dari Program dan kegiatan yang telah direncanakan serta target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada tahun 2021-2026, diharapkan akan berdampak positif terhadap tujuan yang diinginkan yaitu ; **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Internal dan Eksternal yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).**

Target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate 2021 - 2026, dapat di lihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 6 : Target Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sesuai Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Internal dan Eksternal yang Berbasis TIK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online. Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat. Cakupan Wilayah yang terkena Jaringan Internet/Celluler.	Hasil Evaluasi SPBE Evaluator Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. $\frac{\text{Jumlah Layanan Berbasis Aplikasi}}{\text{Target Layanan Pemkot Berbasis Aplikasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Data Base Tersedia}}{\text{Target Data Base OPD Pemkot}} \times 100\%$	0	1,8-2,6	2,6-3,5	3,5-4,2	4,2-5	5
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral. Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Jumlah Rata-Rata Persentase Area Kecamatan yang Terintegrasi dengan jaringan Internet dan Jaringan Telekomunikasi Radio dan Jumlah Konektivitas Internet Layanan Publik (Hotspot) Ruang Publik Kecamatan Lingkup Kota Ternate $\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang terakses Media Informasi}}{\text{Jumlah Kecamatan Lingkup Pemkot}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Ketersediaan data Statistik OPD Terintegrasi}}{\text{Jumlah OPD Lingkup Pemkot}} \times 100\%$	44%	50%	75%	81%	88%	90%
				34%	40,6%	46,9%	50%	62,5%	75%
				80%	85%	90%	93%	97%	100%
				35%	38%	63%	75%	87%	94%
				35%	50%	60%	70%	80%	90%
				174	270	312	455	535	645

### 2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan OPD, adapun staregi dan kebijakan OPD yaitu;

Tabel 7 : Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

No	SASARAN STRATEGIS PD	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Infrastruktur Jaringan TIK Mutu SDM bidang TIK</li> <li>- Penyediaan Regulasi tingkat daerah terkait pelaksanaan SPBE</li> <li>- Penyediaan dan Penerapan Aplikasi yang terkait dengan pelaksanaan e-Goverment dan layanan masyarakat.</li> <li>- Pengembangan Command Center yang dapat diakses langsung oleh Walikota/Wakil Walikota.</li> <li>- Penyediaan Bandwith Internet untuk distribusi layanan ke Peringkat Daerah.</li> <li>- Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang Informatika</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas penyajian Data Statistik serta Tata Kelola Keamanan Informasi	Melengkapi dan mengamankan Data Sektoral Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan dan pemutakhiran data informasi daerah untuk dijadikan data base.</li> <li>- Mewujudkan Sistem Satu Data</li> <li>- Melaksanakan pengamanan Data dan Inormasi.</li> <li>- Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang Keamanan Informasi</li> </ul>
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan Informasi masyarakat dan Publikasi Pemerintah Daerah	Mempermudah mesyarakat dalam akses informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan sebanyak-banyaknya media dalam penyebaran Informasi.</li> <li>- Memperluas wilayah masyarakat yang memperoleh akses informasi.</li> <li>- Mengoptimalkan Kinerja layanan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID).</li> <li>- Kerjasama dengan Media Cetak dan elektronik dalam Pengelolaan konten dan Penyebaran Informasi</li> </ul>

Sumber : Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja diukur tingkat keberhasilan / kegagalan pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)</b>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	2,6 – 3,5
		Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online.	75%
		Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat.	46,9%
		Cakupan Wilayah yang terkena Jaringan Internet/Celluler.	90%
		Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi.	63%
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral.	60%
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	312

Sumber : Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026

Pagu Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada tahun 2023 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dimana **Anggaran Induk pada awal Januari 2023** dengan pagu anggaran sebesar : **Rp. 7.322.330.214,-**. Dengan rincian dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 : Pagu Anggaran Induk Tahun 2023 Per-Program

PROGRAM	PAGU 2023	KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.291.389.341	APBD
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.180.002.944	APBD
Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.469.387.723	APBD
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	137.918.016	APBD
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	243.632.190	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAAN</b>	<b>7.322.330.214</b>	

Sumber : DPA Induk Diskominfo Tahun 2023

Perlu diketahui bahwa pagu anggaran diatas mengalami perubahan yang awalnya sebesar **Rp.7.322.330.214,-** kemudian menjadi sebesar **Rp.7.928.794.696,-** Hal ini terjadi karena ada **Penambahan Anggaran** pada perubahan pagu anggaran APBD Tahun 2023 sebesar **Rp. 606.464.482,-**. Untuk rincian perubahan pagu anggaran (APBD) Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 : Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 Per-Program

PROGRAM	PAGU PERUBAHAN 2023	Bertambah / (Berkurang)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.278.694.533	(12.694.808)
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.210.002.944	30.000.000
Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.058.547.013	589.159.290
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	137.918.016	-
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	243.632.190	-
<b>JUMLAH ANGGARAAN</b>	<b>7.928.794.696</b>	<b>606.464.482</b>

Sumber : DPA Perubahan Diskominfo Tahun 2023

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Ternate melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dianalisis capaian kinerja. Skala nilai peringkat kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

*Tabel 11 : Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Baik
3	$66 \leq 75$	Cukup
4	$51 \leq 65$	Kurang
5	$0 \leq 50$	Sangat Kurang

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja disajikan sebagai berikut :

#### A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Tabel 12 : Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis TIK	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>				
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	2,6	1,20	46,20 %	<b>Kurang</b> (Kep.MenPA N-RB No.13 Tahun 2024)
		Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online.	75 %	66 %	88 %	<b>Baik</b>
		Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat	46,9 %	35 %	74,63 %	<b>Cukup</b>
		Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/Celluler	90 %	90 %	100 %	<b>Sangat Baik</b>
		Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi	63 %	60 %	95,24 %	<b>Sangat Baik</b>
		<b>Urusan Statistik</b>				
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	60 %	26 %	43,33 %	<b>Sangat Kurang</b>
		<b>Urusan Persandian</b>				
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	312	440	141 %	<b>Sangat Baik</b>

**Analisis** : Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, terdapat Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan 7 Indikator Kinerja yang menjadi target oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2023, dalam hal ini dapat diuraikan atau dijelaskan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian Indikator Kinerja : **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, untuk indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target indeks untuk tahun 2023 sebesar 2,6. Akan tetapi hasil penilaian atau pemantauan dan evaluasi yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Ternate dengan **Indeks sebesar 1,20** atau dengan predikat **“Kurang”**. Hal ini menjadi masalah disebabkan antara lain karena : (1) Baru diundangkannya regulasi/peraturan daerah di tahun 2023 yaitu Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Sehingga dalam penyelenggaraan SPBE belum dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. (2) Minimnya dukungan dari OPD guna melaksanakan penerapan SPBE di lingkup Pemerintah Kota Ternate, (3) Serta minimnya sumber daya manusia/aparatur yang memadai dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 2) Capaian Indikator Kinerja : **Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online**, dengan target pada tahun 2023 sebesar 75% dengan realisasinya sebesar 66%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **88%** dengan predikat **“Baik”**
- 3) Capaian Indikator Kinerja : **Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat**, dengan target pada tahun 2023 sebesar 46,9% dengan realisasi 35%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **74,63%** dengan predikat **“Cukup”**.
- 4) Capaian Indikator Kinerja : **Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/Celluler**, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%, dengan realisasinya sebesar 90%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **100%** dengan predikat **“Sangat**

**Baik**". Hal ini menunjukkan bahwa jaringan internet sudah dapat diakses secara keseluruhan di 8 (delapan) wilayah Kecamatan Kota Ternate. Akan tetapi untuk Kecamatan di luar pulau Ternate seperti Kecamatan Batang Dua, Moti dan Hiri perlu pengembangan dan ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas jaringan internetnya dengan menyediakan infrastruktur yang lebih memadai.

- 5) Capaian Indikator Kinerja : **Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi**, yang ditetapkan pada tahun 2023 target sebesar 63%, dengan realisasinya sebesar 60% oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **95,24%** dengan predikat "**Sangat Baik**". Capaian ini tergolong sudah memadai dalam hal ini mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu (1) Kecamatan Ternate Tengah, (2) Kecamatan Ternate Utara, (3) Kecamatan Ternate Selatan, (4) Kecamatan Ternate Barat, (5) Kecamatan Pulau Ternate dan (6) Kecamatan Pulau Hiri. Sedangkan untuk 2 (dua) Kecamatan di luar pulau Ternate seperti Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Moti masih belum efektif, disebabkan kualitas jaringan internetnya masih dikatakan belum baik kualitasnya, sehingga pelayanan informasi dan publikasi masih menjadi terkendala dalam melakukan akses internet.
- 6) Capaian Indikator Kinerja : **Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral**, untuk indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target untuk tahun 2023 sebesar 60%, dengan realisasinya sebesar 26%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **43,33%** dengan predikat "**Sangat Kurang**". Hal ini disebabkan antara lain (1) Minimnya koordinasi dan sinkronisasi antara OPD terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam pengumpulan, pengelolaan data, serta dalam analisis data statistik sektoral, (2) minimnya sumber daya manusia/aparatur di bidang TIK untuk mengelola data statistik.
- 7) Capaian Indikator Kinerja : **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target untuk tahun 2023 Indeks

sebesar 312 dengan realisasinya sebesar 440, hal ini tingkat pencapaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan atau sebesar **141%** dengan Predikat **“Sangat Baik”**. Predikat ini disebabkan salahsatunya adalah (1)Kebijakan, prosedur, dan tindakan preventif, telah menjadi faktor kunci dalam mencapai Indeks Keamanan Informasi yang tinggi. (2) Penggunaan solusi terkini dan pembaruan terhadap infrastruktur keamanan informasi dapat memperkuat pertahanan sistem terhadap ancaman yang terus berkembang. Ini mencerminkan dedikasi dan komitmen organisasi dalam menjaga keamanan informasi, mengamankan aset digital, dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Secara umum tingkat pencapaian Indikator Kinerja yang diukur dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tingkat pencapaian kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2023, dapat dikatakan atau dikategorikan **“Baik atau Berhasil”**.

## **B. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate untuk tahun anggaran 2023 ini menjelaskan persentase pencapaian kinerja antara target dan realisasi, Capaian Kinerja Program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** terdiri dari :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Target 100% sedangkan Realisasinya sebesar **94,12%**.
  - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Target 100% sedangkan Realisasinya sebesar **99,86%**.
  - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan Target 100% sedangkan Realisasinya sebesar **99,83%**.

**2) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan Target 100% sedangkan Realisasinya sebesar **98,98%**.

**3) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan Target 100% sedangkan Realisasinya sebesar **99,71%**.

Capaian Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2023, ini juga menguraikan permasalahan, kebijakan dan upaya mengatasi permasalahannya, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 : Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023

No.	URAIAN PROG/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase Terealisasi Urusan Pemda dalam Tiap Tahun Perencanaan.	100%	94,12%	Pemangkasan anggaran yang disesuaikan dengan keterbatasan APBD Kota Ternate.	1) Penyediaan anggaran yang memadai. 2) Pengembangan dan peningkatan Sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.	Melakukan Koordinasi dan Konsultasi menyangkut perencanaan anggaran program kegiatan tiap tahun atau secara rutin.
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1) Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online. 2) Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi.	100%	99,86%	Keterbatasan Anggaran dalam peningkatan pelayanan Informasi dan Publikasi.	1) Pemanfaatan sebanyak-banyaknya media dalam penyebaran Informasi. 2) Meningkatkan frekuensi penyampaian informasi publik. 3) Memperluas wilayah masyarakat yang memperoleh akses informasi. 4) Kerjasama dengan Media Cetak dan elektronik dalam Pengelolaan konten dan Penyebaran Informasi	Perbanyak penyebaran Informasi, memperlus akses Informasi dan perlu Kerjasama dengan Media Cetak dan Elektronik dalam penyebaran Informasi.
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1) Indeks SPBE. 2) Tingkat Ketersediaan Database Informasi Daerah yang akurat. 3) Cakupan Wilayah yang terakses Jaringan Internet/Celluler.	100%	99,83%	Minimnya Anggaran dan Dukungan dari OPD Lainnya guna mendukung Pelaksanaan SPBE di lingkup Kota Ternate.	1) Sosialisasi dan implementasi dari Perda NO.2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate. 2) Penyediaan dan Pengembangan Command Center / Data Center. 3) Penyediaan dan Penerapan Aplikasi yang terkait dengan pelaksanaan e-Government dan layanan masyarakat. 4) Penyediaan Infrastruktur Jaringan TIK, Mutu SDM bidang TIK.	Meningkatkan anggaran, serta perlu Koordinasi secara rutin antara OPD dengan Dinas Kominfo dalam Penyelenggaraan SPBE.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
II							
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	98,98%	Minimnya ketersediaan data statistik sektoral pemerintah Kota Ternate.	1) Mengumpulkan dan pemutakhiran data informasi daerah untuk dijadikan data base. 2) Mewujudkan Sistem Satu Data	Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis statistik sektoral
III							
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	100%	99,71%	Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi.	1) Melaksanakan pengamanan Data dan Informasi. 2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang Keamanan Informasi	Melakukan Pengamanan informasi pada penyelenggaraan Persandian di Pemda Kota Ternate.

### 3.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

#### A Alokasi Anggaran

Terkait dengan Alokasi Anggaran APBD Tahun 2023 untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate telah mengalami perubahan dimana **Anggaran Induk** pada awal Januari 2023 dengan pagu anggaran sebesar : **Rp.7.322.330.214,-** Sedangkan setelah **Perubahan Anggaran** menjadi sebesar : **Rp.7.928.794.696,-**. Hal ini terjadi karena ada **Penambahan Anggaran** sebesar **Rp. 606.464.482,-**.

Secara rinci ringkasan perubahan pagu anggaran (APBD) Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14 : Perubahan Pagu Anggaran Diskomsandi Ternate Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Persentase (%)
	SEBELUM Perubahan	SESUDAH Perubahan		
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.322.330.214</b>	<b>7.928.794.696</b>	<b>606.464.482</b>	<b>8,28%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.447.859.374</b>	<b>7.054.429.186</b>	<b>606.569.812</b>	<b>9,41%</b>
Belanja Pegawai	3.099.208.073	3.105.672.555	6.464.482	0,21%
Belanja Barang dan Jasa	3.348.651.301	3.948.756.631	600.105.330	17,92%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>874.470.840</b>	<b>874.365.510</b>	<b>(105.330)</b>	<b>-0,01%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	874.470.840	874.365.510	(105.330)	-0,01%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(7.322.330.214)</b>	<b>(7.928.794.696)</b>	<b>606.464.482</b>	<b>8,28%</b>

(Sumber : DPA Perubahan 2023)

## B Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar : **Rp.7.669.990.160**, atau **96,74%**, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 : Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan Realisasi Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.928.794.696</b>	<b>7.669.990.160</b>	<b>96,74</b>	<b>5.581.052.081</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.054.429.186</b>	<b>6.800.311.310</b>	<b>96,40</b>	<b>5.452.304.081</b>
Belanja Pegawai	3.105.672.555	2.912.342.459	93,77	2.631.521.504
Belanja Barang dan Jasa	3.948.756.631	3.887.968.851	98,46	2.820.782.577
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>874.365.510</b>	<b>869.678.850</b>	<b>99,46</b>	<b>128.748.000</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	874.365.510	869.6778.850	99,46	128.748.000
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(7.928.794.696)</b>	<b>(7.669.990.160)</b>	<b>(96,74)</b>	<b>(5.581.052.081)</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>(7.928.794.696)</b>	<b>(7.669.990.160)</b>	<b>(96,74)</b>	<b>(5.581.052.081)</b>

(Sumber : LRA APBD 2023)

Sedangkan untuk rincian selengkapnya dapat dilihat pada Realisasi Anggaran Per-Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Per-31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 : Realisasi Anggaran Per-Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Diskomsandi Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persentase (%)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.928.794.696</b>	<b>7.669.990.160</b>	<b>96,74%</b>
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.928.794.696	7.669.990.160	96,74%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>7.547.244.490</b>	<b>7.290.553.360</b>	<b>96,60%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.278.694.533</b>	<b>4.027.097.659</b>	<b>94,12%</b>
<b>1</b>	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.259.570	71.866.000	99,46%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.653.610	12.612.000	99,67%

-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.418.400	8.327.000	98,91%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.618.400	9.600.000	99,81%
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.927.360	4.900.000	99,44%
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.859.200	4.850.000	99,81%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.964.200	19.777.000	99,06%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.818.400	11.800.000	99,84%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.908.552.795</b>	<b>2.715.122.459</b>	<b>93,35%</b>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.952.555	2.704.622.459	93,33%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.691.040	5.600.000	98,40%
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	0,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.909.200	4.900.000	99,81%
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.672.320</b>	<b>12.585.000</b>	<b>99,31%</b>
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.403.320	7.325.000	98,94%
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.269.000	5.260.000	99,83%
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4.997.500</b>	<b>4.980.000</b>	<b>99,65%</b>
-	Pendataan dan Pengolahan Admintrasi Kepegawaian	4.997.500	4.980.000	99,65%
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>436.022.838</b>	<b>433.583.000</b>	<b>99,44%</b>
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.958.932	11.879.000	99,33%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.543.163	64.444.000	99,85%
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.992.893	14.894.000	99,34%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.480.505	9.381.000	98,95%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12.973.125	12.964.000	99,93%
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	19.760.220	19.700.000	99,70%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.314.000	300.321.000	99,34%
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>187.541.110</b>	<b>184.948.200</b>	<b>98,62%</b>
-	Pengadaan Meubel	49.029.255	47.563.500	97,01%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.511.855	137.384.700	99,19%
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>503.345.800</b>	<b>451.313.000</b>	<b>89,66%</b>
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	100,00%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.733.800	14.243.000	62,65%
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.542.000	13.500.000	99,69%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	462.120.000	418.620.000	90,59%
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>153.302.600</b>	<b>152.700.000</b>	<b>99,61%</b>

-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.462.500	37.400.000	99,83%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.930.000	14.900.000	99,80%
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100.910.100	100.400.000	99,49%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.210.002.944</b>	<b>1.208.347.500</b>	<b>99,86%</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.210.002.944</b>	<b>1.208.347.500</b>	<b>99,86%</b>
-	Monotoring Opini Aspirasi Publik	-	-	0,00%
-	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	515.003.050	513.887.000	99,78%
-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	0,00%
-	Pelayanan Informasi Publik	202.235.349	202.095.000	99,93%
-	Layanan Hubungan Media	345.000.000	345.000.000	100,00%
-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.579.000	100.579.000	100,00%
-	Penguatan Tata Kelola Komisi Daerah	47.185.545	46.786.500	99,15%
-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	0,00%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.058.547.013</b>	<b>2.055.108.201</b>	<b>99,83%</b>
<b>1,</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.700.000</b>	<b>49.700.000</b>	<b>100,00%</b>
-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.700.000	49.700.000	100,00%
<b>2,</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.008.847.013</b>	<b>2.005.408.201</b>	<b>99,83%</b>
-	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	99.943.360	99.442.000	99,50%
-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	183.687.139	183.331.701	99,81%
-	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	486.027.834	485.730.500	99,94%
-	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.209.260.000	1.207.024.000	99,82%
-	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	0,00%
-	Monitoring Evaluasi Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	29.928.680	29.880.000	99,84%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>137.918.016</b>	<b>136.505.200</b>	<b>98,98%</b>

<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>137.918.016</b>	<b>136.505.200</b>	<b>98,98%</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>137.918.016</b>	<b>136.505.200</b>	<b>98,98%</b>
-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	87.841.150	87.486.200	99,60%
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	50.076.866	49.019.000	97,89%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>243.632.190</b>	<b>242.931.600</b>	<b>99,71%</b>
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>243.632.190</b>	<b>242.931.600</b>	<b>99,71%</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>193.696.200</b>	<b>193.232.600</b>	<b>99,76%</b>
-	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.888.000	42.808.000	99,81%
-	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.820.000	50.538.000	99,45%
-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	60.425.600	60.340.000	99,86%
-	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	39.562.600	39.546.600	99,96%
<b>2</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49.935.990</b>	<b>49.699.000</b>	<b>99,53%</b>
-	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah kabupaten/kota	49.935.990	49.699.000	99,53%
<b>JUMLLAH</b>		<b>7.928.794.696</b>	<b>7.669.990.160</b>	<b>96,74%</b>

Sumber : Laporan Realisasi DAU Diskominfo Per-31 Desember Tahun 2023

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian, guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

#### **Sasaran Startegis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) :**

1. Capaian Indikator Kinerja : **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, untuk indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target indeks untuk tahun 2023 sebesar 1,8-2,6. Akan tetapi hasil penilaian atau pemantauan dan evaluasi yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Ternate dengan **Indeks sebesar 1,20** atau dengan predikat **“Kurang”**. Hal ini menjadi masalah disebabkan antara lain karena : (1) Baru diundangkannya regulasi/peraturan daerah di tahun 2023 yaitu Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Sehingga dalam penyelenggaraan SPBE belum dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. (2) Minimnya dukungan dari OPD guna melaksanakan penerapan SPBE di lingkup

Pemerintah Kota Ternate, (3) Serta minimnya sumber daya manusia/aparatur yang memadai dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Capaian Indikator Kinerja : **Tingkat Pelayanan Masyarakat melalui Media Online**, dengan target pada tahun 2023 sebesar 75% dengan realisasinya sebesar 66%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **88%** dengan predikat **“Baik”**.
3. Capaian Indikator Kinerja : **Tingkat Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat**, dengan target pada tahun 2023 sebesar 46,9% dengan realisasi 35%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **74,63%** dengan predikat **“Cukup”**.
4. Capaian Indikator Kinerja : **Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/Celluler**, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%, dengan realisasinya sebesar 90%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **100%** dengan predikat **“Sangat Baik”**. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan internet sudah dapat diakses secara keseluruhan di 8 (delapan) wilayah Kecamatan Kota Ternate. Akan tetapi untuk Kecamatan di luar pulau Ternate seperti Kecamatan Batang Dua, Moti dan Hiri perlu pengembangan dan ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas jaringan internetnya dengan menyediakan infrastruktur yang lebih memadai.
5. Capaian Indikator Kinerja : **Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi**, yang ditetapkan pada tahun 2023 target sebesar 63%, dengan realisasinya sebesar 60% oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **95,24%** dengan predikat **“Sangat Baik”**. Capaian ini tergolong sudah memadai dalam hal ini mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu (1) Kecamatan Ternate Tengah, (2) Kecamatan Ternate Utara, (3) Kecamatan Ternate Selatan, (4) Kecamatan Ternate Barat, (5) Kecamatan Pulau Ternate dan (6) Kecamatan Pulau Hiri. Sedangkan untuk 2 (dua) Kecamatan di luar pulau Ternate seperti Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Moti masih belum efektif, disebabkan kualitas jaringan internetnya masih dikatakan belum baik kualitasnya, sehingga pelayanan informasi dan publikasi masih menjadi terkendala dalam melakukan akses internet.

6. Capaian Indikator Kinerja : **Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral**, untuk indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target untuk tahun 2023 sebesar 60%, dengan realisasinya sebesar 26%, oleh karena itu tingkat pencapaian kinerjanya adalah **43,33%** dengan predikat **“Sangat Kurang”**. Hal ini disebabkan antara lain (1) Minimnya koordinasi dan sinkronisasi antara OPD terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam pengumpulan, pengelolaan data, serta dalam analisis data statistik sektoral, (2) minimnya sumber daya manusia/aparatur di bidang TIK untuk mengelola data statistik.
  
7. Capaian Indikator Kinerja : **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**, indikator kinerja ini telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Diskomsandi Tahun 2021-2026 dengan target untuk tahun 2023 Indeks sebesar 312 dengan realisasinya sebesar 440, hal ini tingkat pencapaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan atau sebesar **141%** dengan Predikat **“Sangat Baik”**. Predikat ini disebabkan salahsatunya adalah (1)Kebijakan, prosedur, dan tindakan preventif, telah menjadi faktor kunci dalam mencapai Indeks Keamanan Informasi yang tinggi. (2) Penggunaan solusi terkini dan pembaruan terhadap infrastruktur keamanan informasi dapat memperkuat pertahanan sistem terhadap ancaman yang terus berkembang. Ini mencerminkan dedikasi dan komitmen organisasi dalam menjaga keamanan informasi, mengamankan aset digital, dan menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Secara umum tingkat pencapaian Indikator Kinerja yang diukur dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tingkat pencapaian kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2023, dapat dikatakan atau dikategorikan **“Baik atau Berhasil”**.

Pencapaian indikator sasaran tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambatnya serta untuk meningkatkan kinerja di masa akan datang akan dijelaskan selanjutnya.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Sasaran**

Untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju kota Ternate sebagai kota jasa yang diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta seluruh Stakeholder. Untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor pendukung kunci keberhasilan tersebut adalah :

- (1) Kemitraan yang kuat dari seluruh aparaturnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
- (2) Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Ternate dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- (3) Adanya dukungan sarana komunikasi Informasi (surat kabar, radio, TV dan Internet) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
- (4) Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.
- (5) Tersedianya Provider penyedia Jasa Internet yang memadai dalam pemenuhan Kebutuhan Komunikasi Internet.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Tahun 2023, yaitu :

- (1) Luasnya Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari beberapa pulau sehingga memerlukan Pembiayaan yang cukup besar untuk bisa menghadirkan kelancaran arus Komunikasi Informasi program kegiatan Pemerintah Kota

Ternate yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate.

- (2) Ketersediaan Provider yang memiliki jaringan layanan internet di wilayah Pemerintahan Kota Ternate masih sangat terbatas
- (3) Infrastruktur pendukung yang masih terbatas di wilayah terluar pulau Ternate yang meliputi kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- (1) Memberikan pelayanan Penyediaan informasi yang maksimal melalui media yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Majalah/Tabloid, Radio FM/AM, internet, media center, pelayanan pengaduan publik, dll).
- (2) Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai Media pemberitaan.
- (3) Meningkatkan efisiensi Belanja Internet Pemerintah Daerah.
- (4) Memudahkan akses internet bagi masyarakat melalui penyediaan Wifi Gratis.
- (5) Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik.
- (6) Menunjang pengembangan ekonomi dan kreatifitas masyarakat melalui berbagai layanan berbasis internet dan aplikasi elektronik.
- (7) Menciptakan koordinasi dan system kerja yang baik antar OPD melalui System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (8) Memberikan peluang bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai modal pembangunan daerah.
- (9) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan Pemerintah Kota Ternate melalui Kelompok Informasi Masyarakat.

## 4.2 LANGKAH ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA AKAN DATANG

Memperhatikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021-2026, serta dengan mengkondisikan tentang situasi dan perkembangan kelembagaan saat ini, maka langkah organisasi untuk meningkatkan kinerja di masa akan datang yaitu :

- 1) Penguatan SDM di bidang Informatika, Desiminasi dan Persandian hingga mencapai jumlah dan kapasitas yang memadai. Penguatan ini dilaksanakan dengan mengikut sertakan Aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam diklat-diklat formal dan non formal yang menunjang keahlian dan keterampilan di bidang informatika, pengelolaan informasi dan persandian.
- 2) Penyediaan dan Penguatan Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi, guna menunjang pelaksanaan pelaksanaan e-Goverment dan pelayanan Publik. Penguatan dimaksud adalah dengan menyediakan peralatan, sistem, software dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pekerjaan di bidang informatika, pengelolaan informasi dan persandian.
- 3) Penyediaan data-data utama yang berhubungan dengan Pengembangan Sitem Informasi. Ketersediaan Data adalah merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam diklat-diklat formal dan non formal yangmenunjang keahlian dan keterampilan di bidang informatika, pengelolaan informasi dan persandian sebagai pusat informasi dan media center pada Pemerintah Kota Ternate.
- 4) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait bidang Informatika, Diseminasi Informasi dan Persandian. Untuk kebutuhan Harmonisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, maka keterlibatan dan koordinasi pihak terkait lainnya harus terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena perbedaan tugas pokok dan kewenangan masing- masing intansi yang sering beririsan dalam suatu urusan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate yang dapat kami sampaikan, kiranya laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi kinerja organisasi.

Ternate, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Persandian Kota Ternate



**DAMIS BASIR, SE, ME**  
NIP : 19680724 200003 1 004